



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(DPPA - OPD)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**Urusan Pemerintahan : 5.01 Perencanaan  
5.05 Penelitian dan Pengembangan**

**Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.000  
Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah**

**PENGGUNA ANGGARAN :**

**NAMA : Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg**  
**NIP : 196704271993031015**  
**JABATAN : Kepala BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 269 Telepon (0411) 453050  
MAKASSAR 90231

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

NOMOR 2206 / XI / TAHUN 2022  
TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanah Pasal 24 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam

negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 250);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278);
  36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
  37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295);
  38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
  39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
  40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
  41. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi



- Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 18);
42. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
  43. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Asset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 46);
  44. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 53);
  45. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
  46. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022);
  47. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara;
  2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 6/I/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran sebagai Pejabat yang diberi Wewenang menandatangani SPM, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 7/I/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. URUSAN : PERENCANAAN
  2. ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
  3. PENDAPATAN :
    - a. Pendapatan : Rp. 52.880.000,00
    - Berkurang : Rp. 25.920.000,00
    - Menjadi Sebesar : Rp. 26.960.000,00
  4. BELANJA :
    - a. Belanja Operasi : Rp. 59.986.828.378,00
    - Bertambah : Rp. 1.783.004.518,00
    - Menjadi sebesar : Rp. 61.769.832.896,00
    - b. Belanja Modal : Rp. 849.047.400,00
    - Bertambah : Rp. 260.009.600,00
    - Menjadi Sebesar : Rp. 1.109.057.000,00
- 
- Jumlah Belanja Daerah : Rp. 60.835.875.778,00
- Bertambah : Rp. 2.043.014.118,00
- Menjadi sebesar : Rp. 62.878.889.896,00

KEDUA : Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sah, apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan mempedomani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disahkan di Makassar

Pada tanggal 01 NOVEMBER 2022

an.GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si

Pangkat:Pembina Utama

NIP:19650405 199010 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan.



PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

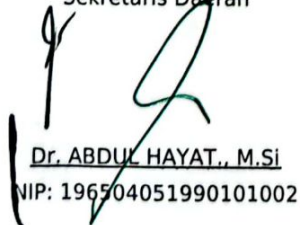
- a. Nama : Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg
- b. NIP : 196704271993031015
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD


Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

  
Dr. ABDUL HAYAT., M.Si  
NIP: 196504051990101002

Makassar, tanggal 01 November 2022

Disahkan oleh,  
PPKD

  
Drs. Muhammad Rasyid  
NIP: 196412311992031123



PROVINSI SULAWESI SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN  
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg  
b. NIP : 196704271993031015  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH



Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,  
PPKD

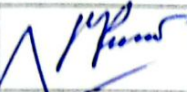


Drs. Muhammad Rasyid  
NIP: 196412311992031123

Makassar, tanggal 01 November 2022  
Pengguna Anggaran

Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg  
NIP: 196704271993031015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.51.0000/001/2022					
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp52.880.000	Rp26.960.000
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp26.960.000	Rp26.960.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah			Rp25.920.000	Rp0
Jumlah Pendapatan				Rp52.880.000	Rp26.960.000
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp59.986.828.378	Rp61.769.832.896
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp26.864.996.605	Rp28.954.033.106
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp33.121.831.773	Rp32.815.799.790
5 2	BELANJA MODAL			Rp849.047.400	Rp1.109.057.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp749.047.400	Rp944.057.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp0	Rp115.000.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			Rp100.000.000	Rp50.000.000
Jumlah Belanja				Rp60.835.875.778	Rp62.878.889.896
Total Surplus/(Defisit)				(Rp60.782.995.778)	(Rp62.851.929.896)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Makassar, Tanggal 1 November 2022 Menyetujui,  <b>SEKRETARIS DAERAH</b> <b>Dr. ABDUL HAYAT, M.Si</b> Pangkat, Pembina Utama NIP. 18650405 199010 1 002	
Januari	Rp2.250.000	Januari	Rp13.137.344.381		
Februari	Rp2.250.000	Februari	Rp0		
Maret	Rp2.250.000	Maret	Rp0		
April	Rp2.250.000	April	Rp16.087.156.942		
Mei	Rp2.250.000	Mei	Rp4.654.416		
Juni	Rp2.250.000	Juni	Rp0		
Juli	Rp2.250.000	Juli	Rp12.778.119.932		
Agustus	Rp2.250.000	Agustus	Rp0		
September	Rp2.250.000	September	Rp0		
Oktober	Rp2.250.000	Oktober	Rp11.458.905.717		
November	Rp2.230.000	November	Rp9.412.708.508		
Desember	Rp2.230.000	Desember	Rp0		
Jumlah	Rp26.960.000	Jumlah	Rp62.878.889.896		
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Ir. A. DARMAWAN BINTANG, M.dev. Plg.	196704271993031015	Kepala Bappelitbangda		

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Drs. H. MUHAMMAD RASYID	196412311992031123	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	ASRUL SANI, SH., M.Si	197503212003121008	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
4	Hj. ANDI MIRNA, SH	196710061993012002	Pit. Kepala Biro Organisasi	

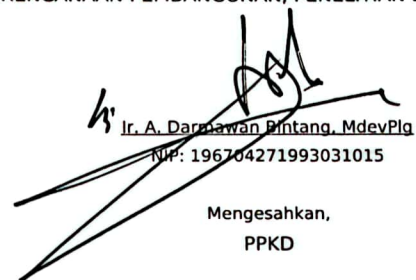
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD							
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022													
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.51.0000/001/2022													
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp52.880.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp26.960.000	(Rp25.920.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.960.000	(Rp25.920.000)
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp26.960.000	Retribusi Daerah					Rp26.960.000	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha					Rp26.960.000	Retribusi Jasa Usaha					Rp26.960.000	Rp0
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp26.960.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp26.960.000	Rp0
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					Rp26.960.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					Rp12.960.000	(Rp14.000.000)
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan						:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan						
	::: kantin						::: kantin						
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.960.000	Rp12.960.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.960.000	Rp12.960.000	Rp0		
	::: Sewa Kamar Mess dan Aula (Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan KUPA)						::: Sewa Kamar Mess dan Aula (Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan KUPA)						
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp14.000.000	Rp14.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp0	Rp0	(Rp14.000.000)		
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan					Rp0	Retribusi Pemakaian Ruangan					Rp14.000.000	Rp14.000.000
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan						:: Retribusi Pemakaian Ruangan						
	::: Sewa Kamar Mess dan Aula (Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan KUPA)						::: Sewa Kamar Mess dan Aula (Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan KUPA)						
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp0	Rp0	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp14.000.000	Rp14.000.000	Rp14.000.000		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah					Rp25.920.000	Lain-lain PAD yang Sah					Rp0	(Rp25.920.000)
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan					Rp25.920.000	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan					Rp0	(Rp25.920.000)
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD					Rp25.920.000	Hasil Sewa BMD					Rp0	(Rp25.920.000)
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD					Rp25.920.000	Hasil Sewa BMD					Rp0	(Rp25.920.000)
	:: Hasil Sewa BMD						:: Hasil Sewa BMD						




Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		
	::: Kantin					::: Kantin					
	Hasil Sewa BMD	1 Tahun	Tahun	Rp25.920.000	Rp25.920.000	Hasil Sewa BMD	1 Tahun	Tahun	Rp0	Rp0	(Rp25.920.000)
	<b>Jumlah Rp52.880.000</b>					<b>Jumlah Rp26.960.000</b>					<b>(Rp25.920.000)</b>

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		
Januari		Rp2.250.000
Februari		Rp2.250.000
Maret		Rp2.250.000
April		Rp2.250.000
Mei		Rp2.250.000
Juni		Rp2.250.000
Juli		Rp2.250.000
Agustus		Rp2.250.000
September		Rp2.250.000
Oktober		Rp2.250.000
November		Rp2.230.000
Desember		Rp2.230.000
Jumlah		Rp26.960.000

Makassar, tanggal 01 November 2022  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  
Ir. A. Darnawan Bintang, MdevPlg  
NIP: 196704271993031015

Mengesahkan,  
PPKD

  
Drs. Muhammad Rasyid  
NIP: 196412311992031123

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandan Tangan
1	Drs. H. Muhammad Rasyid 	19641231 199203 2 123	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2	H. Sumardi, S.Sos, M.Si 	19680821 199103 1 030	Kepala Badan Pendapatan Daerah	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
<b>5</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5	01				<b>PERENCANAAN</b>				<b>50.922.114.638</b>	<b>849.047.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.771.162.038</b>	<b>53.167.174.356</b>	<b>1.109.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.276.231.356</b>	<b>2.505.069.318</b>	
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>33.071.268.846</b>	<b>769.117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.840.386.246</b>	<b>36.357.482.754</b>	<b>1.069.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.426.539.754</b>	<b>3.586.153.508</b>	
5	01	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>630.576.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.576.700</b>	<b>693.963.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693.963.900</b>	<b>63.387.200</b>	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77.681.000	0	0	0	77.681.000	60.701.000	0	0	0	60.701.000	(16.980.000)	
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106.332.400	0	0	0	106.332.400	111.260.300	0	0	0	111.260.300	4.927.900	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		446.563.300	0	0	0	446.563.300	522.002.600	0	0	0	522.002.600	75.439.300	
5	01	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>27.284.249.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.284.249.005</b>	<b>29.364.475.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.364.475.106</b>	<b>2.080.226.101</b>	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.864.996.605	0	0	0	26.864.996.605	28.954.033.106	0	0	0	28.954.033.106	2.089.036.501	
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		319.724.400	0	0	0	319.724.400	307.314.000	0	0	0	307.314.000	(12.410.400)	
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99.528.000	0	0	0	99.528.000	103.128.000	0	0	0	103.128.000	3.600.000	
5	01	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>73.837.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.837.500</b>	<b>73.837.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.837.500</b>	<b>0</b>	
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.775.500	0	0	0	15.775.500	15.775.500	0	0	0	15.775.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.062.000	0	0	0	58.062.000	58.062.000	0	0	0	58.062.000	0	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>301.665.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.665.600</b>	<b>403.733.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.733.100</b>	<b>102.067.500</b>	
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	150.067.500	0	0	0	150.067.500	150.067.500	
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.497.500	0	0	0	78.497.500	78.497.500	0	0	0	78.497.500	0	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.617.300	0	0	0	67.617.300	19.617.300	0	0	0	19.617.300	(48.000.000)	
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		155.550.800	0	0	0	155.550.800	155.550.800	0	0	0	155.550.800	0	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.356.556.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.356.556.800</b>	<b>2.164.298.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.164.298.900</b>	<b>807.742.100</b>	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		144.998.500	0	0	0	144.998.500	148.332.500	0	0	0	148.332.500	3.334.000	
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135.561.000	0	0	0	135.561.000	216.881.000	0	0	0	216.881.000	81.320.000	
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79.853.500	0	0	0	79.853.500	39.255.500	0	0	0	39.255.500	(40.598.000)	
5	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.703.800	0	0	0	200.703.800	200.703.800	0	0	0	200.703.800	0	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		795.440.000	0	0	0	795.440.000	1.559.126.100	0	0	0	1.559.126.100	763.686.100	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>10.780.000</b>	<b>769.117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779.897.400</b>	<b>16.170.000</b>	<b>1.069.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.085.227.000</b>	<b>305.329.600</b>	
5	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.040.000	100.000.000	0	0	104.040.000	4.040.000	50.000.000	0	0	54.040.000	(50.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.740.000	669.117.400	0	0	675.857.400	12.130.000	1.019.057.000	0	0	1.031.187.000	355.329.600	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1.013.366.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.366.100</b>	<b>965.168.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965.168.128</b>	<b>(48.197.972)</b>	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		168.044.100	0	0	0	168.044.100	163.936.500	0	0	0	163.936.500	(4.107.600)	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		845.322.000	0	0	0	845.322.000	801.231.628	0	0	0	801.231.628	(44.090.372)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2.400.237.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.237.141</b>	<b>2.675.836.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.675.836.120</b>	<b>275.598.979</b>	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		577.330.000	0	0	0	577.330.000	644.590.000	0	0	0	644.590.000	67.260.000	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		454.446.560	0	0	0	454.446.560	574.858.560	0	0	0	574.858.560	120.412.000	
5	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103.964.500	0	0	0	103.964.500	103.964.500	0	0	0	103.964.500	0	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		544.836.560	0	0	0	544.836.560	549.836.560	0	0	0	549.836.560	5.000.000	
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		719.659.521	0	0	0	719.659.521	802.586.500	0	0	0	802.586.500	82.926.979	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>12.188.621.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.188.621.292</b>	<b>11.261.969.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.261.969.814</b>	<b>(926.651.478)</b>	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>1.01</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			<b>2.841.044.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.841.044.500</b>	<b>3.451.093.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.451.093.500</b>	<b>610.049.000</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)				
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		319.058.000	0	0	0	0	319.058.000	393.251.200	0	0	0	0	393.251.200	74.193.200	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.521.986.500	0	0	0	0	2.521.986.500	3.057.842.300	0	0	0	0	3.057.842.300	535.855.800	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>1.02</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>201.454.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.454.800</b>	<b>267.362.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.362.800</b>	<b>65.908.000</b>		
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		201.454.800	0	0	0	0	201.454.800	267.362.800	0	0	0	0	267.362.800	65.908.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>1.03</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>9.146.121.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.146.121.992</b>	<b>7.543.513.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.543.513.514</b>	<b>(1.602.608.478)</b>		
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.191.426.692	0	0	0	0	8.191.426.692	6.394.888.114	0	0	0	0	6.394.888.114	(1.796.538.578)	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		624.870.500	0	0	0	0	624.870.500	832.800.600	0	0	0	0	832.800.600	207.930.100	
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		329.824.800	0	0	0	0	329.824.800	315.824.800	0	0	0	0	315.824.800	(14.000.000)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>5.662.224.500</b>	<b>79.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.742.154.500</b>	<b>5.547.721.788</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.587.721.788</b>	<b>(154.432.712)</b>		
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>1.01</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			<b>1.284.252.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.284.252.400</b>	<b>1.242.904.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.242.904.638</b>	<b>(41.347.762)</b>		
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136.571.300	0	0	0	0	136.571.300	128.052.800	0	0	0	0	128.052.800	(8.518.500)	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		181.940.100	0	0	0	0	181.940.100	177.720.100	0	0	0	0	177.720.100	(4.220.000)	
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		271.700.000	0	0	0	0	271.700.000	257.495.568	0	0	0	0	257.495.568	(14.204.432)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		287.969.000	0	0	0	287.969.000	282.445.000	0	0	0	282.445.000	(5.524.000)	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		231.852.000	0	0	0	231.852.000	224.351.170	0	0	0	224.351.170	(7.500.830)	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174.220.000	0	0	0	174.220.000	172.840.000	0	0	0	172.840.000	(1.380.000)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>1.02</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				<b>1.233.287.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.233.287.800</b>	<b>1.207.388.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.388.500</b>	<b>(25.899.300)</b>	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		163.926.900	0	0	0	163.926.900	156.156.900	0	0	0	156.156.900	(7.770.000)	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		156.263.000	0	0	0	156.263.000	183.922.900	0	0	0	183.922.900	27.659.900	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		282.405.900	0	0	0	282.405.900	265.222.400	0	0	0	265.222.400	(17.183.500)	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		164.781.200	0	0	0	164.781.200	151.785.100	0	0	0	151.785.100	(12.996.100)	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		159.162.900	0	0	0	159.162.900	171.943.300	0	0	0	171.943.300	12.780.400	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		306.747.900	0	0	0	306.747.900	278.357.900	0	0	0	278.357.900	(28.390.000)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>1.03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>3.144.684.300</b>	<b>79.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.224.614.300</b>	<b>3.097.428.650</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.137.428.650</b>	<b>(87.185.650)</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		209.568.700	0	0	0	209.568.700	202.040.800	0	0	0	202.040.800	(7.527.900)	
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		155.620.900	0	0	0	155.620.900	155.620.900	0	0	0	155.620.900	0	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.157.713.000	79.930.000	0	0	2.237.643.000	2.134.150.250	40.000.000	0	0	2.174.150.250	(63.492.750)	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		206.402.800	0	0	0	206.402.800	196.202.800	0	0	0	196.202.800	(10.200.000)	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		134.000.000	0	0	0	134.000.000	129.711.500	0	0	0	129.711.500	(4.288.500)	
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		281.378.900	0	0	0	281.378.900	279.702.400	0	0	0	279.702.400	(1.676.500)	
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>9.064.713.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.064.713.740</b>	<b>8.602.658.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.602.658.540</b>	<b>(462.055.200)</b>		
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>9.064.713.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.064.713.740</b>	<b>8.602.658.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.602.658.540</b>	<b>(462.055.200)</b>		
5	05	02	1.01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>			<b>852.776.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852.776.500</b>	<b>1.094.736.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.094.736.500</b>	<b>241.960.000</b>		
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		611.367.200	0	0	0	611.367.200	833.107.200	0	0	0	833.107.200	221.740.000	
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		241.409.300	0	0	0	241.409.300	261.629.300	0	0	0	261.629.300	20.220.000	
5	05	02	1.02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>			<b>2.876.991.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.876.991.800</b>	<b>2.437.626.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.437.626.800</b>	<b>(439.365.000)</b>		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		412.986.300	0	0	0	412.986.300	254.146.300	0	0	0	254.146.300	(158.840.000)	
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.202.638.200	0	0	0	2.202.638.200	1.937.183.200	0	0	0	1.937.183.200	(265.455.000)	
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		261.367.300	0	0	0	261.367.300	246.297.300	0	0	0	246.297.300	(15.070.000)	
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>1.03</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>			<b>3.823.870.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.823.870.540</b>	<b>3.714.460.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.714.460.940</b>	<b>(109.409.600)</b>		



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		546.654.500	0	0	0	546.654.500	494.434.500	0	0	0	494.434.500	(52.220.000)	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.129.001.000	0	0	0	1.129.001.000	1.076.851.400	0	0	0	1.076.851.400	(52.149.600)	
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		198.215.040	0	0	0	198.215.040	207.465.040	0	0	0	207.465.040	9.250.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.950.000.000	0	0	0	1.950.000.000	1.935.710.000	0	0	0	1.935.710.000	(14.290.000)	
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>1.04</b>		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>				<b>1.511.074.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.511.074.900</b>	<b>1.355.834.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355.834.300</b>	<b>(155.240.600)</b>	
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		561.000.000	0	0	0	561.000.000	203.221.600	0	0	0	203.221.600	(357.778.400)	
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	32.580.000	0	0	0	32.580.000	(7.420.000)	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		403.215.400	0	0	0	403.215.400	688.128.200	0	0	0	688.128.200	284.912.800	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		156.032.500	0	0	0	156.032.500	118.160.500	0	0	0	118.160.500	(37.872.000)	
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350.827.000	0	0	0	350.827.000	313.744.000	0	0	0	313.744.000	(37.083.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp13.137.344.381
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp16.087.156.942
Mei	Rp4.654.416
Juni	Rp0
Juli	Rp12.778.119.932
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp11.458.905.717
November	Rp9.412.708.508
Desember	Rp0
Jumlah	Rp62.878.889.896

Makassar, tanggal 01 November 2022  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

*(Handwritten signature)*  
 Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg  
 NIP: 196704271993031015

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. A. DARMAWAN BINTANG, M.dev. Plg	196704271993031015	Kepala Bappelibangda	<i>(Handwritten signature)</i>
	Drs. H. MUHAMMAD RASYID	196412311992031123	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	<i>(Handwritten signature)</i>
3.	ASRUL SANI, SH., M.Si	197503212003121008	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	<i>(Handwritten signature)</i>
4.	Hj. ANDI MIRNA, SH	196710061993012002	Plt. Kepala Biro Organisasi	<i>(Handwritten signature)</i>